

## IMPLEMENTASI TATA NILAI KETAQWAAN BERDASARKAN KODE KEHORMATAN PRAJA

Romi Surya Darma<sup>1</sup>, Asmungi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumatera Barat, Indonesia

Telp: +6281361064849

E-mail: romisuryadarma@gmail.com

### ABSTRACT

*This study aims to describe how the implementation of the values of taqwa is based on a code of praja honor by praja on IPDN West Sumatra Campus. Theoretical concepts used according to George C. Edward III (1990: 149-154) concerning policy implementation. This research was a descriptive studied use a qualitative approach. The study was conducted at the IPDN West Sumatra Campus with the object of research being elements of Officials, Caregivers and Praja at the IPDN West Sumatra Campus. The research, data collection techniques through observation, interviews, and documentation, data analysis techniques with data reduction. The results of the study showed that the implementation of the religious values system in Muslim Praja had been implemented in the communication variable, resources, and bureaucratic structure, but the disposition variable was still constrained by budget constraints. While in Praja who are Christians and Hindus the implementation of communication variables and bureaucratic structure has been implemented, but still found obstacles in the implementation of the resource variable and disposition variable.*

### ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi tata nilai ketaqwaan berdasarkan Kode Kehormatan Praja pada Praja IPDN Kampus Sumatera Barat. Penelitian ini penting untuk melihat implementasi kebijakan berbasis karakter pada pendidikan kedisiplinan. Konsep teori yang digunakan menurut George C Edward III ( 1990: 149-154 ) tentang implementasi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di IPDN Kampus Sumatera Barat dengan objek penelitian yaitu unsur para Pejabat, Pamong Pengasuh dan Praja di IPDN Kampus Sumatera Barat. Teknik pengumpulan melalui Observasi data, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data dengan reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi tata nilai ketaqwaan pada Praja yang beragama Islam telah diimplementasikan pada variable komunikasi, sumber daya, maupun struktur birokrasi, namun dari variable disposisi masih terkendala keterbatasan anggaran. Sementara pada Praja yang beragama Kristen dan Hindu implementasi pada variable komunikasi dan struktur birokrasi telah terimplementasi, namun masih ditemukan kendala dalam implementasi pada variable sumber daya dan variable disposisi.

### KEYWORDS

Implementation  
Values of Taqwa  
Code of Honor Praja

### Kata Kunci

Implementasi  
Tata Nilai Ketaqwaan  
Kode Kehormatan Praja

## 1. Pendahuluan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja telah menjadi acuan baku bagi Insitut Pemerintahan Dalam Negeri dalam mengatur tata kehidupan Praja selaku peserta didik, pedoman tata kehidupan terhadap praja ini memiliki nilai yang sangat penting karena diharapkan akan menjadi value tersendiri dari keberadaan Lembaga Pendidikan Tinggi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang menghasilkan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan spesialisasi pamong praja pada setiap tahunnya.

Sebagai mana pesan penting yang tertuang dalam Permendagri No.63 Tahun 2015 : Menimbang bahwa pembinaan mental dan disiplin secara konseptual bagi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri merupakan persyaratan untuk mencapai tujuan pendidikan kepomongprajaan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka menyiapkan kader pamong praja sebagai calon aparatur pemerintahan yang

berdisiplin tinggi, unggul, berwawasan negarawan, ilmunan, profesional, demokratis, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka upaya serius Kementerian Dalam Negeri melalui struktur birokrasi IPDN untuk terus menyiapkan kader pamong praja yang siap ditempatkan diseluruh Indonesia, menjadi semakin konkrit dengan adanya pedoman ini, mengingat tugas-tugas kepomongprajaan adalah tugas vital yang sangat dibutuhkan dalam upaya memastikan hadirnya Negara, melalui pelayanan pemerintahan khususnya terkait tugas-tugas pamong praja mulai dari wilayah kota hingga wilayah-wilayah pelosok negeri terdalam dan terluar di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Haily (2006) kepomongprajaan adalah aparat pemerintah yang berfungsi memenuhi kepentingan dan keperluan masyarakat. Beban tugas kepomongprajaan bukanlah hal yang sederhana, tugas ini merupakan tugas yang tidak hanya membutuhkan kemampuan akademis dan teknis yang mumpuni dalam administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, namun juga membutuhkan

penekanan pada aspek moral dan akhlak kepribadian, yang sejatinya dapat atau mampu dicerminkan oleh para praja melalui perwujudan nilai-nilai ketaqwaan kepada Tuhan YME; kesetiaan kepada dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; berjiwa pangayom dengan mengutamakan Sila ke-3; semangat kerja yang keras serta rela berkorban demi kepentingan bangsa negara dan rakyat; berdisiplin, jujur, bertanggung jawab, sehingga diharapkan lahirnya kader ASN yang berilmu pengetahuan dan berintegritas dalam membangun dan melayani bangsa Negara dan rakyat.

Untuk mengkonstruksi dan mewujudkan kondisi ideal tersebut maka Permendagri nomor 63 tahun 2015 mengamanahkan : Bab V Kode Kehormatan Praja Pasal 9: *Pertama*, Kode Kehormatan Praja sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf c angka 1), merupakan tata nilai dan semangat kepomongprajaan. *Kedua*, Kode Kehormatan Praja yang dimaksud dalam pasal 1 meliputi : pertama, Kader aparatur sipil pemerintahan dalam negeri yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; kedua Berjiwa pamong dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa; Ketiga, Putra bangsa yang siap mengabdikan dan rela berkorban, berkerja keras dan pantang menyerah dalam pelaksanaan tugas untuk kepentingan bangsa dan Negara; Keempat, Dipercaya, berdisiplin, bertanggung jawab, pembela kebenaran/keadilan dan kejujuran; Kelima, Insan berilmu berkemauan dan berkemampuan dalam membangun bangsa dan Negara.

Menurut Inu Kencana Syafie (2013:187) Agama adalah petunjuk bagi manusia untuk membedakan baik dengan buruk, benar dengan salah, indah dengan jelek, yang merupakan petunjuk dari Tuhan yang dapat dibuktikan secara etika, logika dan estetika. Dari kutipan tersebut jelas terdapat hubungan penting antar nilai-nilai keagamaan dalam setiap sendi-sendi kehidupan sosial umat manusia, termasuk dalam bernegara, pemerintahan ataupun kepemimpinannya, pentingnya sehingga dasar negara Pancasila mengamanahkan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu sebagai ikatan bersama yang tak terpisahkan antara eksistensi agama dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketaqwaan dalam Kode Kehormatan Praja adalah kata serapan yang bermakna umum, yang pada pengertiannya menekankan pentingnya praja selaku peserta didik untuk terus memelihara dan meningkatkan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 1126) taqwa adalah terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagi praja IPDN pendekatan

pembentukan adab melalui pengamalan nilai-nilai keagamaan adalah suatu keutamaan, menurut Hamka (1981:153) taqwa adalah memelihara hubungan dengan Tuhan, bukan saja karena takut, tetapi lebih lagi karena ada kesadaran diri, sebagai hamba. Melalui tata nilai ketaqwaan inilah diharapkan dapat menjadi pendekatan serta pemberdayaan yang diharapkan mampu menghasilkan para ASN kader pamong praja yang berintegritas. Bila peserta didik dapat memahami arti ketaatan kepada Tuhan YME, kemudian selanjutnya ditransformasikan menjadi ketaatan kepada aturan yang ada, maka tentu pada akhirnya akan tertanam dalam diri praja selaku peserta didik, adab dan karakter budi pekerti yang mulia. Menurut Inu Kencana Syafie (2003 : 9) itulah sebabnya sebagai pemimpin pemerintahan harus bermoral, artinya yang bersangkutan selain ulama (rohaniawan) juga harus umara (negarawan).

Sebagai salah satu tata nilai yang penting dalam membentuk adab peserta didik, Implementasi tata nilai ketaqwaan ini tentu menarik untuk diteliti, tentu saja beserta faktor pendukung dan kendala dalam melaksanakan implementasi tata nilai ketaqwaan tersebut. Implementasi dari suatu aturan dapat dikatakan berhasil bila para pelaksana aturan tersebut memahami dan dipahamkan betul akan tujuan dari aturan tersebut, bukan hanya paham dan dipahamkan, para implementator juga perlu diberi ruang gerak untuk berupaya mewujudkan konstruksi dan sasaran dari tujuan tersebut, mungkin berupa kewenangan terbatas untuk memaksimalkan capaian dari tujuan aturan ataupun kebijakan tersebut.

Menurut George C. Edward III (1990 : 149-154) terdapat empat variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan (<http://eprints.stainkudus.ac.id>), yaitu:

#### 1) Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Agustino), adalah komunikasi. Komunikasi menurutnya sangat menentukan tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif akan terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Selain pengetahuan akan apa yang akan dikerjakan, aturan atau kebijakan yang akan dikomunikasikan juga harus transmisi (tepat), jelas (tidak ambigu) dan konsisten.

#### 2) Sumber daya

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino) indikator sumber daya terdiri beberapa elemen, yaitu :

- a) Staf; Penambahan jumlah staf dan implementator

nya saja tidak cukup, tetapi perlu juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel). b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. d) Fasilitas; fasilitas fisik merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### 3) Disposisi

Hal-hal penting yang perlu dicermati dalam variable disposisi, menurut George C. Edward III (dalam Agustino), adalah : a) Pengangkatan birokrat; pemilihan dan pengangkatan personel pelaksanaan kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. b) Insentif; Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi factor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi, Agustino (2010: 154).

### 4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang baik mampu mendukung aturan-aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan dengan koordinasi yang baik, maka kunci keberhasilan implementasi kebijakan terdapat pada struktur birokrasi.

Dua karakteristik menurut George C. Edward III (1990 : 154), yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan : a) Standar Operasional Prosedurs (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan. b) Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi tata nilai ketaqwaan berdasarkan Kode Kehormatan Praja, oleh para pejabat, pamong pengasuh dan praja IPDN Kampus Sumatera Barat pada Tahun Akademik (T.A.) 2018-2019. Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada umumnya dan IPDN Kampus Sumatera Barat pada Khususnya,

dalam melaksanakan pembinaan tata nilai ketaqwaan berdasarkan kode kehormatan praja, dan juga sekaligus sebagai pengembangan dalam bidang keilmuan khususnya terkait Kepamongprajaan. his document.

## 2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atas fenomena yang terdapat dalam lingkup penelitian. Penelitian kualitatif menekankan tujuan eksploratif, yaitu suatu upaya untuk mengamati bahkan terlibat langsung serta menjelaskan segala sesuatu atas fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini pemahaman yang digunakan adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan sebagai wujud implementasi tata nilai ketaqwaan berdasarkan Kode Kehormatan Praja pada Praja IPDN Kampus Sumatera Barat.

Informan pada penelitian ini meliputi : Pejabat Bagian Administrasi Keprajaan, Pamong Pengasuh, Staf ASN dan Praja IPDN Kampus Sumatera Barat, informan diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, menurut Sugiyono (2009:219) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, menurut Sugiyono (2009:247) reduksi data yaitu dengan merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Adapun tahap analisis pada penelitian ini menggunakan konsep implementasi George C Edward III (1990: 149-154) dengan variabel : Komunikasi; sumber daya; disposisi; dan struktur birokrasi.

Penelitian berlokasi di IPDN Kampus Sumatera Barat, alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena peneliti bekerja sebagai Dosen dan Kepala Satuan (Kasat) Pengasuhan di IPDN kampus Sumatera Barat, sehingga secara otoritas peneliti telah terlibat langsung dan telah mengamati langsung akan fenomena yang diteliti. Penelitian sendiri dilakukan sejak bulan Agustus 2018 hingga bulan Juli 2019.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 KOMUNIKASI (transmisi; kejelasan; dan konsistensi)

Menurut George C. Edward III (1990 : 149) salah satu variable penting yang menentukan berhasil suatu implementasi kebijakan adalah komunikasi, dalam artian para pelaksana kebijakan dan aturan tersebut sebaiknya mendapat informasi yang jelas, benar, tepat dan konsisten tentang kebijakan atau aturan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan tindakan peneliti, upaya komunikasi mengenai tata nilai ketaqwaan yang berdasarkan Kode Etik Kehormatan praja yaitu berupa aturan ketentuan dan sanksi yang mengikat, telah dilakukan oleh para pejabat dan pamong pengasuh kepada praja secara tepat sesuai aturan yang berlaku dengan berkelanjutan dan konsisten, upaya komunikasi dilakukandisetiap kesempatan, baik secara personal, melalui kegiatan-kegiatan dinas dan apel atau pengecekan harian.

Diantara arahan dan perintah dari pamong pengasuh kepada praja adalah dengan menerapkan aturan wajib kegiatan ibadah. Bagi praja beragama Islam telah di sampaikan secara jelas dan konsisten bahwa Sholat lima waktu wajib dilaksanakan secara berjemaah dimesjid, selain itu juga disampaikan bahwa setiap selesai ibadah sholat asar seluruh praja muslim diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan tadarus bersama, hingga seluruh praja dapat khatam atau menuntaskan bacaan alquran pada akhir semester genap setiap tahunnya. Selain itu agar praja muslim juga diwajibkan secara bergilir untuk menyampaikan kuliah tujuh menit atau kultum setiap harinya selepas Sholat Isya, untuk ibadah puasa sunnat disampaikan bahwa itu termasuk dalam ketentuan kegiatan yang sifatnya tidak wajib atau pilihan.

Bagi praja yang beragama Kristen, para pamong pengasuh juga telah menyampaikan terkait aturan dan ketentuan dalam menjalankan kegiatan keagamaan, bentuk arahan dan perintah tersebut antara lain yaitu, setiap pukul 05:00 wib mulai dari hari senin hingga hari jumat seluruh praja Kristen melaksanakan ibadah berdoa bersama, kegiatan keagamaan lainnya setiap jumat siang dan minggu pagi seluruh praja Kristen melaksanakan kebaktian bersama. Begitu juga bagi praja yang beragama Hindu juga telah mendapat arahan dan perintah yang jelas dari para pejabat dan Pamong Pengasuh dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.

Untuk dapat melihat komposisi jumlah Praja IPDN kampus Sumatera Barat berdasarkan penganut agama T.A 2018/2019 dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Praja IPDN kampus Sumatera Barat Berdasarkan Pemeluk Agama T.A. 2018/2019

No	Agama	Jumlah Penganut (Orang)
1	Islam	179
2	Kristen Katolik	10
3	Kristen Protestan	36
4	Hindu	2

5	Budha	-
Total		227

Sumber : Data Bagian Adm.Keprajaan IPDN kampus Sumatera Barat, 2019

Sementara Komposisi Jumlah Pamong Pengasuh berdasarkan penganut agama pada T.A 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Pamong Pengasuh IPDN Kampus Sumatera Barat Berdasarkan Penganut Agama Tahun 2019

No	Agama	Jumlah Penganut (Orang)
1	Islam	10
2	Kristen Katolik	1
3	Kristen Protestan	1
4	Hindu	-
5	Budha	-
Total		12

Sumber : Diolah dari data Bagian Adm.Umum IPDN kampus Sumatera Barat ,2019

### 3.2 SUMBER DAYA (staf; informasi; wewenang; dan fasilitas)

Dari hasil pengamatan dan wawancara diketahui bahwa, bagi praja yang beragama Islam sumber dayastaf yang langsung memberikan pendampingan maupun pengajaran kepada praja, Bagian Administrasi Keprajaan melalui kepala sub bagian pengasuhan telah menyediakan staf atau tenaga kerohanian yaitu ustadz yang diundang pada setiap hari senin sore, kegiatan ini dinamakan dengan kegiatan Kasere atau Kajian Senin Sore. Sementara dalam upaya pembinaan dan peningkatan kesadaran dalam mengimplemetasikan tata nilai ketaqwaan dalam setiap harinya, antara lain seperti kegiatan tadarus ba'da Ashar dan kultum bergiliran ba'da Isya. Dalam pelaksanaannya praja yang beragama Islam mendapat pendampingan dan pengawasan langsung dari para pejabat dan pamong pengasuh di lingkup Bagian Administrasi Keprajaan IPDN kampus Sumatera Barat.

Dari hasil pengamatan dan wawancara juga diketahui bahwa, bagi praja yang beragama Kristen dan Hindu hingga saat ini belum memiliki sumber daya atau Staf tenaga kerohanian yang tetap dikampus. Dari hasil pengamatan dan wawancara diketahui bahwa, praja IPDN Kampus Sumatera Barat yang beragama Kristen dan Hindu hanya mendapat



internalisasi tentang nilai-nilai keagamaan, atau nilai-nilai ketaqwaannya daripada pendeta atau pastor atau pemuka agama pada saat ibadah mingguan dan hari-hari besar keagamaan di tempat ibadah masing-masing.

Sementara untuk kegiatan ibadah harian seperti kebaktian subuh dan kebaktian jumat siang praja beragama Kristen didampingi dan diawasi oleh pamong pengasuh, demikian pula ibadah harian bagi praja beragama Hindu setiap harinya juga didampingi dan diawasi oleh pamong pengasuh yang beragama Kristen, dan satu orang ASN jabatan fungsional umum yang beragama Hindu. Namun dari hasil informasi yang peneliti peroleh sejak Juni 2019, ASN jabatan fungsional umum yang beragama Hindu tersebut telah berganti agama menjadi pemeluk agama Islam, dengan demikian tidak ada lagi staf yang mendampingi dan mengawasi ibadah harian bagi praja yang beragama Hindu.

Sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler maka bentuk kegiatan ekstrakurikuler Praja IPDN kampus Sumatera Barat berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Kegiatan Ekstrakurikuler Praja IPDN kampus Sumatera Barat Berdasarkan Agama T.A. 2018/2019

No	Agama	Bentuk Kegiatan	Frekuensi (hari / minggu)	Jasa Konsultasi/ Staf Pendamping
1	Islam	Kajian senin sore Tadarus ba'da ashar Kultum bergiliran ba'da Isya	1 5 7	Ustadz Pamong Pengasuh Pamong Pengasuh
2	Kristen Katolik	Kebaktian subuh Kebaktian jumat siang Kebaktian minggu pagi	5 1 1	Pamong Pengasuh Pamong Pengasuh Pastor
3	Kristen Protestan	Kebaktian subuh Kebaktian jumat siang Kebaktian minggu pagi	5 1 1	Pamong Pengasuh Pamong Pengasuh Pendeta
4	Hindu	Berdoa harian Ibadah Hari Besar Hindu	1 Berdasarkan Kalender Hari Besar Hindu	Pemimpin Agama
5	Budha	-	-	-

Sumber: Diolah dari data Bagian Adm.KeprajaanIPDN kampus Sumatera Barat,2019

Pada variable sumber daya diketahui bahwa bagi

praja beragama Islam tidak memiliki kendala perihal ketersediaan sumber kerohanian, namun bagi praja yang beragama Kristen dan Hindu, keterbatasan sumber daya atau Staf kerohanian dalam lingkungan kampus masih menjadi kendala.

Menurut George S Edward III (1990 : 150) Informasi dalam variable sumber daya memiliki dua bentuk, yang pertama pelaksana implementasi harus memahami aturan yang ada dan yang kedua adalah kepatuhan terhadap aturan.

Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagai wujud pelaksanaan tata nilai ketaqwaan, praja telah memahami bahwa kegiatan keagamaan adalah bagian tugas kewajiban yang harus dilaksanakan, selain mengatur tentang aturan dan ketentuan, bagian administrasi keprajaan juga mengatur sanksi terkait pelanggaran atas tugas dan kewajiban tersebut. Bentuk sanksi adalah berupa sanksi edukasi yaitu berupa, membaca atau membuat salinan sejumlah ayat-ayat suci dari kitab agama masing-masing, yang wajib diselesaikan dalam tempoh waktu tertentu, ketentuan penjalanan sanksi ini diawasi langsung oleh pamong pengasuh pendamping pada kegiatan kerohanian masing-masing.

Pendekatan edukasi keagamaan lainnya juga diterapkan dalam sanksi atas pelanggaran disiplin dalam siklus kehidupan praja, sanksi berupa mengaji atau membaca kitab suci masing-masing, dengan pilihan ayat-ayat pilihan yang diharapkan dapat menggugah praja atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan, kegiatan penjalanan dan pembinaan ini juga langsung diawasi oleh para pamong pengasuh piket jaga. Dalam hal kewenangan, tugas pokok dan fungsi pamong pengasuh telah menjadi dasar legalitas dari pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan praja tersebut, dimana kewenangan tersebut termasuk dalam salah satu point kinerja satuan pamong pengasuh yaitu, membina, mengawasi dan mendampingi seluruh siklus kehidupan praja, dan kegiatan keagamaan adalah salah satu bagian dari siklus kehidupan praja berdasarkan Permendagri Nomor 63 Tahun 2015.

Dari segi fasilitas, dari hasil pengamatan peneliti diketahui bahwa, lembaga dalam hal ini IPDN kampus sumatera barat, telah memfasilitasi sarana dan prasarana ibadah untuk praja, seperti tersedianya ruangan atau rumah ibadah yang diperuntukan, beserta kitab suci yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan keagamaan tersebut. Sementara itu untuk mendukung kegiatan keagamaan yang berada diluar kampus, Bagian Adminitrasi Umum IPDN kampus Sumatera Barat juga memfasilitasi seluruh kebutuhan transportasi praja untuk kegiatan keagamaan masing-masing, baik yang merupakan kebutuhan ibadah ruitin mingguan

maupun kebutuhan pada hari-hari besar keagamaan.

Ketersediaan Fasilitas Rumah Ibadah bagi Praja IPDN Kampus Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Fasilitas Rumah Ibadah Bagi Praja IPDN kampus Sumatera Barat Tahun 2019

No	Agama	Rumah Ibadah
1	Islam	1 (Mesjid)
2	Kristen Katolik	1 (Kelas Utama)
3	Kristen Protestan	1 (Kelas Utama)
4	Hindu	1 (Ruangan Khusus)
5	Budha	-

Sumber : Diolah dari Data Bagian Adm.Umum IPDN Kampus Sumatera Barat,2019

Khusus bagi praja yang beragama Kristen dan Hindu rumah ibadah utama yaitu Gereja dan Pura tidak terdapat di lingkungan Kampus IPDN Sumatera Barat, untuk Gereja berada di Kota Bukittinggi dan Pura berada di Kota Padang. Untuk mengetahui jarak tempuh rumah ibadah praja dari IPDN Kampus Sumatera Barat beserta fasilitas pendukung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Lokasi dan Jarak Tempuh Rumah Ibadah Praja IPDNKampus Sumatera Barat Tahun 2019

No	Agama	Rumah Ibadah	Lokasi Jarak tempuh (km)	Fasilitas Transportasi
1	Islam	MesjidKampus IPDN	0	-
2	Kristen Katolik	GerejaBukittinggi	14	2 Bus Dinas
3	Kristen Protestan	GerejaBukittinggi	14	1 Bus Dinas
4	Hindu	PuraPadang	89	1 Mini Bus Dinas
5	Budha	-	-	-

Sumber : Diolah dari Data Bagian Adm.Umum IPDN Kampus Sumatera Barat,2019

### 3.3 DISPOSISI (pengangkatan birokrat; dan insentif)

Dalam implementasi suatu kebijakan ataupun aturan, tentu memerlukan bagian-bagian yang merupakan penggerak bagi kebijakan ataupun aturan tersebut, tanpa keberadaan penggerak tersebut tentu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan implementasi akan sulit dicapai dengan maksimal, penggerak yang dimaksud adalah tersedianya staf yang berkompeten

dalam menggerakkan implementator untuk mencapai sasaran dan tujuan dari kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan bagi suatu struktur organisasi.

Terkait dengan kegiatan keagamaan pada Praja IPDN Kampus Sumatera Barat, peneliti menemukan kendala dalam pelaksanaannya, adapun kendala yang peneliti ditemukan adalah, adanya ruang kosong khususnya bagi kebutuhan staf atau tenaga pendamping keagamaan bagi praja, khususnya bagi praja yang beragama Kristen dan Hindu, hal ini diketahui dari belum tersedianya unsur staf keagamaan yang khusus dan berkompeten dalam bidang keagamaan tertentu, sehingga ditemukan bahwa praja yang Bergama Kristen maupun Hindu melaksanakan kegiatan ibadah keagamaan secara bersama dan mandiri, dalam artian praja melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut tidak didampingi oleh tenaga staf atau jasa konsultan yang berkompeten dibidangnya, dari hasil wawancara peneliti dengan para informan diketahui bahwa, ketidakterediaan staf pendamping kegiatan agama ini mengakibatkan pemahaman praja terhadap nilai-nilai keagamaan yang dijalankan menjadi tidak maksimal.

Kendala lainnyayang peneliti temukan adalah, belum tersedianya dukungan anggaran dari IPDN kampus Sumatera Barat untuk insentif staf pendamping atau jasa konsultasi kegiatan keagamaan.Khusus anggaran insentif untuk staf pendamping atau jasa konsultasi kegiatan keagamaan bagi praja beragama Islam masih diupayakan secara swadaya melalui bantuan pendanaan yang berumber dari kas Mesjid IPDN kampus Sumatera Barat dan kas Koperasi pegawai IPDN kampus Sumatera Barat.

Dari sisi insentif pegawai,IPDN kampus Sumatera Barat telah memberikan insentif pendampingan kegiatan keagamaan kepada Pamong Pengasuh sebagai pembina, pendamping dan pengawas kegiatan, sehingga dukungan dari Pamong Pengasuh menjadi semakin maksimal, namun kembali lagi keterlibatan pamong pengasuh hanya terbatas dalam upaya pembinaan, pendampingan dan pengawas saja, dari segi kompetensi dalam ilmu keagamaan pamong pengasuh mengakui tidak menguasai sepenuhnya ranah ilmu yang dibutuhkan.

### 3.4 STRUKTUR BIROKRASI (*Standar Operating Prosedurs*; dan fragmentasi)

Secara standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan keagamaan praja IPDN Kampus Sumatera Barat masih dilaksanakan dalam bentuk jadwal kegiatan rutin,namun belum terperinci sebagai suatu SOP, pola kegiatan diarahkan langsung oleh pamong pengasuh, baik yang bersifat harian maupun mingguan, ini terlihat dari kehadiran pengasuh dalam

mendampingi dan mengawasi setiap kegiatan keagamaan praja.

Secara struktur birokrasi, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan bagi praja IPDN kampus Sumatera Barat, bergantung pada keterlibatan dan peran dari seluruh pemangku struktur organisasi yang ada, mulai dari direktur, wakil direktur, jajaran kepala bagian, jajaran kapala sub bagian, pamong pengasuh hingga staf umum. Walau notabene kegiatan pembinaan, pengawasan dan pendampingan tata nilai ketaqwaan praja IPDN Kampus Sumatera Barat ini adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi bagian administrasi keprajaan, namun dukungan dari bagian lainnya terutama bagian administrasi umum sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaannya, berdasarkan pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan, diketahui bahwa koordinasi antar bagian dalam organisasi IPDN Kampus Sumatera Barat dalam mendukung pelaksanaan rutinitas kegiatan

#### 4. Kesimpulan

Pada variable komunikasi, implementasi tata nilai ketaqwaan dilaksanakan melalui internalisasi tentang aturan, ketentuan dan sanksi terkait tata nilai ketaqwaan kepada praja telah dilaksanakan dengan tepat, jelas dan konsisten oleh para unsur pejabat dan Pamong Pengasuh melalui berbagai interaksi baik secara personal maupun kedinasan.

Sementara Pada variabel sumber daya, implementasi tata nilai ketaqwaan telah berjalan berupa penyediaan staf pendamping atau jasa konsultasi yang berkompeten baru terbatas bagi praja beragama Islam, namun ketersediaan staf pendamping atau jasa konsultasi yang berkompeten untuk kegiatan keagamaan bagi praja beragama Kristen dan Hindu masih terkendala. Dari segi dukungan terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk berbagai kegiatan keagamaan praja baik didalam maupun diluar kampus telah berjalan melalui koordinasi dan kerjasama antar bagian di IPDN Kampus Sumatera Barat.

Sedangkan pada variable disposisi, implementasi terkendala dari segi pendanaan kegiatan keagamaan, terutama anggaran untuk staf pendamping atau jasa konsultasi yang berkompeten, khusus keterbatasan anggaran kegiatan keagamaan untuk praja beragama Islam ditutupi dengan upaya swadaya dari melalui kas mesjid IPDN kampus Sumatera Barat dan Koperasi pegawai IPDN kampus Sumatera Barat, namun pada praja yang beragama Kristen dan Hindu anggaran untuk kegiatan keagamaan belum tersedia. Dari segi insentif bagi Pamong Pengasuh yang bertugas melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan dalam setiap kegiatan keagamaan telah terpenuhi.

Terakhir pada Variable struktur organisasi, Secara standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan keagamaan praja IPDN Kampus Sumatera Barat masih dilaksanakan dalam bentuk jadwal kegiatan rutin, namun belum terperinci sebagai suatu SOP. Sementara itu dari indikator fragmentasi diketahui bahwa koordinasi antar bagian di IPDN Kampus Sumatera Barat dalam mendukung pelaksanaan rutinitas kegiatan keagamaan praja telah berjalan dengan pembagian tugas yang jelas dan tegas.

#### 5. Daftar Pustaka

- Agostiono, 2010, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.154.
- Edward III, George, C, 1990, Public Policy Implementating, jay press inc, London,
- Hamka, 1981, Tafsir Al-Azhar , Yayasan Nurul Islam, Jakarta, Hlm.153.
- Hayli, aziz, 2006, Jurnal Pamong Praja, Forum Komunikasi Alumni Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Hlm.4.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta. Hlm.1126.
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2003, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Refika Aditama, Bandung, Hlm.9.
- Syafiie, Inu Kencana, 2013, Ilmu Pemerintahan, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm.187.
- [Http://eprints.stainkudus.ac.id](http://eprints.stainkudus.ac.id) Buzan T. (2007). Mind maps. September 3, 2009, retrieved from